



# RENCANA KERJA TAHUN 2023 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI



## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari rangkaian sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja PD sangat penting peranannya dan turut menentukan keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah ditetapkan dalam RKPD 2023 Provinsi Jambi dan merupakan tahap awal dari rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian akan dibahas bersama-sama dengan Bappeda Provinsi Jambi dan OPD lain dalam kegiatan Forum OPD Provinsi Jambi.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini, diharapkan menjadi bahan acuan dalam perumusan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 guna pencapaian target-target kinerja sasaran pembangunan sebagaimana dalam RKPD 2023.

Jambi, 2022

**Kepala Dinas,**

**Ir. HARRY ANDRIA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan daerah yang meliputi RPJPD 20 tahun, RPJMD 5 tahun, dan RKPD tahunan. Kemudian dinas/badan daerah wajib menjabarkannya ke dalam rencana strategis (renstra) dinas/badan. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional. RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi. Dalam menyusun rancangan awal RPJPD, Bappeda meminta masukan dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah. Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RKPD menggunakan Renja-PD dengan Kepala PD. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



Perangkat Daerah menyusun Renja-PD, Rancangan Renja- PD disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja-PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Renja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun sebagai bahan pembahasan dalam beberapa tahapan proses selanjutnya yang meliputi forum Perangkat Daerah, musrenbang RKPD, dan tahap penyempurnaan/sinkronisasi dengan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2023 yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;
- b. Undang-undang 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
- c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- f. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- g. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55333);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
- n. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksudkan untuk merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023, sesuai dengan rencana program prioritas yang telah digariskan dalam RKPD Provinsi Jambi Tahun 2023.

Tujuannya adalah untuk menyelaraskan program/kegiatan yang akan dilaksanakan guna pencapaian tujuan/sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, dan RPJPD.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dirangkum dalam 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai berikut :

- Bab I : Menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan renja meliputi latar belakang perlunya penyusunan renja, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.
- Bab II : Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- Bab III : Menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023, yang ditetapkan dengan memperhatikan kebijakan nasional dalam sektor energi dan sumberdaya mineral.
- Bab IV : Menguraikan rencana kerja dan kerangka pendanaan perangkat daerah.
- Bab V : Merupakan bab penutup, berisi catatan penting yang menjadi perhatian dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Tahun 2021 merupakan tahun kelima dari periode perencanaan strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2016-2021. Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang tertuang ke dalam 5 program, 21 kegiatan dan 53 sub kegiatan, strategis dan administratif, secara umum dapat dilaksanakan sesuai rencana, berdasarkan pencapaian target kinerja keluaran masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan.

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Jambi terdiri atas Belanja operasi dan belanja modal sebesar Rp. 18.979.364.869,00 dan pada Perubahan APBD mengalami perubahan alokasi anggaran APBD menjadi Rp. 17.145.415.273,00,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 15.651.135.209,00,- atau 91.28%.

Tabel 2.1

**REALISASI PROGRAM/KEGIATAN YANG MELEBIHI TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN**

Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	96,00 %	99,99 %	

Tabel 2.2

**REALISASI PROGRAM/KEGIATAN YANG TIDAK MEMENUHI  
TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN**

Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Peningkatan Pemanfaatan EBT	8,5 %	2,82 %	
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	75 %	0,00 %	
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Perusahaan Air Tanah yang menerapkan > 75% syarat pengusahaan	35 %	0,00 %	
Program Pengelolaan Ketengalistrikan	Persentase Peningkatan Panjang Jaringan (JTM/JTR)	19,4 %	0,00 %	



Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya dan melebihi target kinerja program dan kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 (n-2) disebabkan dari beberapa faktor internal dan eksternal. Berikut faktor-faktor penyebabnya antara lain :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program/Kegiatan  
Rata-rata pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021 (n-2) pencapaian target kinerja tidak sesuai dengan yang direncanakan akibat dari wabah pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia, keterbatasan anggaran dan perubahan regulasi.
- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja Program/Kegiatan  
Penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja program/kegiatan adalah partisipasi masyarakat telah merespon bentuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintah secara langsung dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Faktor-faktor penyebab capaian kinerja Program/Kegiatan melebihi target  
Realisasi capaian kinerja melebihi target yang direncanakan merupakan suatu indikator keberhasilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yang sangat membanggakan, hal ini terjadi dikarenakan besarnya partisipasi pelaku swasta dan masyarakat dalam pencapaian realisasi yang melebihi target.
- d. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran  
Dalam bidang pemanfaatan energi terbarukan, karena biaya teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan relatif mahal/tinggi, dan daerah yang belum memiliki infrastruktur energi lokasinya terletak di daerah terpencil, terluar dan tertinggal, maka diperlukan peran serta Pemerintah dalam membangun infrastruktur dimaksud, melalui program dan pendanaan yang memadai.

**Tabel TC. 29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Jambi**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Renstra PD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2022		Catatan
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP	BB Indeks		BB Indeks	B Indeks		BB Indeks	B Indeks		
3 29 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	5 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	
3 29 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat penyelesaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%	
3 29 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%	
3 29 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%	
3 29 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%	
e 29 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	7 unit	29 Unit	3 unit	1 unit	33%	7 Unit	37 Unit	529%	
3 29 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	6 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%	
3 29 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%	
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Terjaganya Kualitas air tanah melalui penyusunan zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan	20 Persen	20 Persen	20 Persen	20 Persen		20 Persen	20 Persen		
3 29 02 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi	Jumlah Dokumen Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	150%	
3 29 02 1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemaknaan, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Tersedianya pedoman izin dan terkendalinya pelaksanaan pemanfaatan air tanah	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	0%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Tersedianya data, Revisi Pergub NPA, pemanfaatan air tanah yang baik, benar dan berkelanjutan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	5 Dokumen	7 Dokumen	140%	

3	29	03		<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>Terlaksananya Pertambangan Yang Baik dan Benar (good mining practices)</b>	NA	75,61 Persen				NA	NA	NA	
3	29	03	1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	persentase penetapan dan pengawasan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	NA		100 Persen	100 Persen	100%	NA	NA	NA	
3	29	03	1.02	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut	Jumlah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara yang tertata dan terawasi	NA		100 Persen	- Persen	0%	NA	NA	NA	
3	29	03	1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tertatanya perizinan mineral bukan logam dan batuan	NA		100 Persen	100 Persen	100%	NA	NA	NA	
3	29	03	1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Tertatanya izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam WPR	NA		100 Persen	100 Persen	100%	NA	NA	NA	
3	29	03	1.05	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Persentase penatausahaan IUP OPK untuk Pengolahan dan Pemurnian	NA		100 Persen	- Persen	0%	NA	NA	NA	
3	29	03	1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi		NA		100 Persen	- Persen	0%	NA	NA	NA	
3	29	03	1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Pergub Harga Patokan Mineral Bukan Logam	NA		100 Persen	- Persen	0%	NA	NA	NA	
3	29	03	1.08	Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya	Persentase penerbitan IUP OP Khusus untuk pengangkutan dan penjualan	NA		100 Persen	- Persen	0%	NA	NA	NA	
3	29	03	1.09	Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan yang kegiatan usahanya dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase IUP OP untuk Penjualan	NA		100 Persen	- Persen	0%	NA	NA	NA	
3	29	03	1.10	Persetujuan perubahan saham, direksi dan komisaris, untuk usaha yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan	Persentase persetujuan perubahan saham, direksi dan komisaris untuk usaha yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai kewenangan	NA		100 Persen	- Persen	0%	NA	NA	NA	
3	29	03	1.11	Penerbitan izin sementara untuk penjualan mineral atau batubara yang tergal bagi pemegang izin usaha pemegang eksplorasi yang diterbitkan oleh Gubernur pada saat kegiatan eksplorasi atau studi kelayakan	Persentase penerbitan izin sementara untuk penjualan mineral atau batubara yang tergal bagi pemegang izin usaha pemegang eksplorasi yang diterbitkan oleh Gubernur pada saat kegiatan	NA		100 Persen	- Persen	0%	NA	NA	NA	
3	29	05		<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi</b>	100 Persen		100 Persen			100 Persen			
					<b>Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan</b>	634 SBM		100 Persen			178 SBM			
3	29	05	1.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	3 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	67%	
3	29	05	1.02	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Dokumen		3 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
3	29	05	1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
3	29	05	1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	634 SBM		100 Persen	100 Persen	100%	178 SBM	178 SBM	28%	

3	29	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>Persentase peningkatan rumah tangga berlistrik</b>	<b>99,93</b>	<b>Persen</b>	<b>99,90</b>	<b>Persen</b>	<b>99,92</b>	<b>Persen</b>	<b>99,99</b>	<b>Persen</b>	<b>100,07%</b>	<b>99,92</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>100,07%</b>	
						<b>Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis</b>	<b>27</b>	<b>Persen</b>		<b>Persen</b>	<b>26</b>	<b>Persen</b>		<b>Persen</b>		<b>26</b>	<b>Persen</b>				
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah	Persentase pemegang IUTPLU yang tertib administrasi dan teknis	100	Persen	100	Persen	100	Persen	99,00	Persen	99%	100	Persen	100	Persen	100%	
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase pemegang IUTPLS yang tertib administrasi dan teknis	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%	
3	29	06	1.03		Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang	Persentase pemegang izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (IPJ Telematika) yang tertib administrasi dan	100	Persen	NA		100	Persen	-	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%	
3	29	06	1.04		Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah	Persentase Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah	100	Persen	NA		100	Persen	-	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%	
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	Persentase pemegang IUJPTL yang tertib administrasi dan teknis	100	Persen	NA		100	Persen	-	Persen	0%	100	Persen	100	Persen	100%	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Persentase peningkatan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	100	Persen	NA		100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%	

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sehubungan bidang urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pilihan sehingga tidak memiliki SPM dan juga tidak memiliki standar sebagai tolok ukur pencapaian kinerja. Kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diukur dengan menggunakan indikator dengan target kinerja yang telah disepakati secara internal sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Capaian kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Tahun 2021 digambarkan dalam Tabel TC.30.

Tabel TC. 30

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi

Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (Thn (n +1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
Rasio Elektrifikasi	96 %	99,92 %	99,93 %	99,94 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	
Peningkatan Pemanfaatan EBT	8,5 %	NA	NA	NA	2,82 %	NA	NA	NA	
Penurunan Penggunaan energi tak terbarukan/fosil	NA	178 SBM	634 SBM	1.289 SBM	NA	278 SBM	634 SBM	1.289 SBM	
Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	75 %	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Persentase Peningkatan Panjang Jaringan (JTM/JTR)	19,4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Persentase Perusahaan Air Tanah yang menerapkan > 75% syarat perusahaan	35 %	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	



### **2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jambi dalam bidang urusan energi dan sumber daya mineral sebagaimana pada Tabel T-C.31 berikut :

Tabel TC. 31

## Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023

## Provinsi Jambi

## PD : Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE REKENING				RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
3	29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
3	29	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prov. Jambi	NILAI SAKIP	BB Indeks	BB	19.265.517.620	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prov. Jambi	NILAI SAKIP	BB	19.265.517.620		
3	29	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	353.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	353.000.000		
3	29	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	110.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	110.000.000	
3	29	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5.500.000	
3	29	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.500.000	
3	29	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	6.000.000	
3	29	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	6.000.000	
3	29	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	55.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	55.000.000	
3	29	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	165.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	165.000.000	
3	29	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Jambi	Tingkat penyelesaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	13.475.877.620	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Jambi	Tingkat penyelesaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	13.475.877.620	
3	29	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Jambi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	orang	80	12.875.877.620	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Jambi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	80	12.875.877.620	
3	29	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	100.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1	100.000.000	
3	29	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	100.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	100.000.000	
3	29	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1	100.000.000	
3	29	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Prov. Jambi	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen	1	100.000.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Prov. Jambi	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1	100.000.000	
3	29	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Jambi	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	1	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Jambi	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1	100.000.000	
3	29	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	100.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	100.000.000	

3	29	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prov. Jambi</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>920.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prov. Jambi</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>920.000.000</b>	
3	29	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Jambi	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	100.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Jambi	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	100.000.000	
3	29	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Jambi	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	100.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Jambi	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	100.000.000	
3	29	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Jambi	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	Laporan	1	100.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Jambi	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	1	100.000.000	
3	29	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPD	Laporan	1	230.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPD	1	230.000.000	
3	29	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Jambi	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	1	110.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Jambi	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1	110.000.000	
3	29	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	160.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	160.000.000	
3	29	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Jambi	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1	120.000.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Jambi	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD	1	120.000.000	
3	29	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prov. Jambi</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>808.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prov. Jambi</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>808.000.000</b>	
3	29	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Prov. Jambi	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Unit	1	60.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Prov. Jambi	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1	60.000.000	
3	29	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Jambi	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	1	78.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Jambi	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1	78.000.000	
3	29	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	50.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	50.000.000	
3	29	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	50.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	50.000.000	
3	29	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	50.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	50.000.000	
3	29	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Jambi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	20	120.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Jambi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20	120.000.000	
3	29	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Jambi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan-undangan	orang	40	200.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Jambi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan-undangan	40	200.000.000	
3	29	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Jambi	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	40	200.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Jambi	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40	200.000.000	

3	29	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prov. Jambi</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.225.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prov. Jambi</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>1.225.000.000</b>	
3	29	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1	30.000.000	
3	29	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	120.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1	120.000.000	
3	29	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Jambi	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Jambi	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1	35.000.000	
3	29	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Jambi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	1	70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Jambi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1	70.000.000	
3	29	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Jambi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Paket	1	65.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Jambi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1	65.000.000	
3	29	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov. Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov. Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	1	25.000.000	
3	29	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Prov. Jambi	Jumlah bahan/material yang tersedia	-	-		Penyediaan Bahan/Material	Prov. Jambi	Jumlah bahan/material yang tersedia	-		
3	29	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	30.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	30.000.000	
3	29	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	700.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	700.000.000	
3	29	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov. Jambi	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov. Jambi	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	50.000.000	
3	29	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	100.000.000	
3	29	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prov. Jambi</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>Unit</b>	<b>7</b>	<b>490.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prov. Jambi</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>7</b>	<b>490.000.000</b>	
3	29	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Jambi	Jumlah unit kendaraan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Jambi	Jumlah unit kendaraan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0	-	
3	29	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Jambi	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	2	100.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Jambi	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2	100.000.000	
3	29	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Prov. Jambi	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	1	190.000.000	Pengadaan Mebel	Prov. Jambi	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	190.000.000	
3	29	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan	Unit	5	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan	5	200.000.000	
3	29	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah aset tetap lainnya yang tersedia	-			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah aset tetap lainnya yang tersedia			
3	29	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah gedung kantor yang dibangun	-			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah gedung kantor yang dibangun			
3	29	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dibangun	-			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dibangun			
3	29	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	-			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia			
3	29	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prov. Jambi</b>	<b>Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>	<b>Laporan</b>	<b>6</b>	<b>793.600.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prov. Jambi</b>	<b>Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan</b>	<b>6</b>	<b>793.600.000</b>	
3	29	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Jambi	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	15.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Jambi	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	15.000.000	
3	29	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Jambi	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	170.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Jambi	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	170.000.000	
3	29	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	1	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	10.000.000	
3	29	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	3	598.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	3	598.600.000	

3	29	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prov. Jambi	<b>Tingkat penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara</b>	Persen	100	1.200.040.000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prov. Jambi	<b>Tingkat penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara</b>	100	1.200.040.000	
3	29	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Jambi	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara, dan dibayar pajaknya	Unit	8	379.920.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Jambi	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara, dan dibayar pajaknya	8	379.920.000	
						Prov. Jambi	Jumlah Tenaga Non PNS (Sopir) yang dibayar gajinya	orang	24	32.400.000		Prov. Jambi	Jumlah Tenaga Non PNS (Sopir) yang dibayar gajinya	24	32.400.000	
3	29	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Jambi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang pelihara dan dibayar pajaknya dan perizinannya	Unit	28	235.440.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Jambi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang pelihara dan dibayar pajaknya dan perizinannya	28	235.440.000	
3	29	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	40	65.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40	65.000.000	
3	29	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	Unit	4	238.680.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	4	238.680.000	
						Prov. Jambi	Jumlah Tenaga Non PNS (security) yang dibayar gajinya	orang	3	48.600.000		Prov. Jambi	Jumlah Tenaga Non PNS (security) yang dibayar gajinya	3	48.600.000	
3	29	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	100.000.000	
3	29	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Jambi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	100.000.000	
3	29	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGI</b>	Prov. Jambi	<b>Terjadanya Kualitas air tanah melalui penyusunan zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lagan</b>	Persen	20	600.000.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	Prov. Jambi	<b>Terjadanya Kualitas air tanah melalui penyusunan zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lagan</b>	20	600.000.000	
3	29	02	1.01		<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi</b>	Prov. Jambi	<b>Jumlah Dokumen Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi</b>	Dokumen	2	300.000.000	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi</b>	Prov. Jambi	<b>Jumlah Dokumen Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi</b>	2	300.000.000	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Yang Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	100.000.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Yang Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1	100.000.000	
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah Yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	200.000.000	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah Yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1	200.000.000	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi	Laporan	0	-	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi	0	-	
3	29	02	1.02		<b>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>		<b>Tersedianya pedoman izin dan terkendalinya pelaksanaan pemanfaatan air tanah</b>	Dokumen	5	100.000.000	<b>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>		<b>Tersedianya pedoman izin dan terkendalinya pelaksanaan pemanfaatan air tanah</b>	5	100.000.000	
3	29	02	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah	0	0	-	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah	0	-	
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah dokumen layanan perizinan dan informasi izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah	Dokumen	1	50.000.000	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah dokumen layanan perizinan dan informasi izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah	1	50.000.000	
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Laporan	4	50.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	4	50.000.000	

3	29	02	1.03		<b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	Prov. Jambi	Tersedianya data, Revisi Pergub NPA, pemanfaatan air tanah yang baik, benar dan berkelanjutan	Dokumen	5	200.000.000	<b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	Prov. Jambi	Tersedianya data, Revisi Pergub NPA, pemanfaatan air tanah yang baik, benar dan berkelanjutan	5	200.000.000	
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah dokumen data dan informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi yang terkumpul	Dokumen	1	100.000.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah dokumen data dan informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi yang terkumpul	1	100.000.000	
3	29	02	1.03	02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil perhitungan, perumusan dan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	Laporan	0	-	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil perhitungan, perumusan dan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	0	-	
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	Laporan	4	100.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Prov. Jambi	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	4	100.000.000	
3	29	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	Prov. Jambi	<b>Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi</b>	Persen	100	1.025.000.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	Prov. Jambi	<b>Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi</b>	100	1.025.000.000	
							<b>Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan</b>	SBM	634	13.789.386.000			<b>Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan</b>	634	13.789.386.000	
3	29	05	1.01		<b>Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan</b>	Prov. Jambi	<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan</b>	Dokumen	3	275.000.000	<b>Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan</b>	Prov. Jambi	<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan</b>	3	275.000.000	
3	29	05	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratn Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai KeArah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Prosedur (Pedoman Teknis) dan PesyaratnIzin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai KeArah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Dokumen	1	75.000.000	Penetapan Prosedur dan Pesyaratn Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai KeArah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Prosedur (Pedoman Teknis) dan PesyaratnIzin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai KeArah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	1	75.000.000	
3	29	05	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Prov. Jambi	Jumlah dokumen Rekomendasi Izin dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai KeArah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Dokumen	1	100.000.000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Prov. Jambi	Jumlah dokumen Rekomendasi Izin dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai KeArah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	1	100.000.000	
3	29	05	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Dokumen	1	100.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	1	100.000.000	
3	29	05	1.02		<b>Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Prov. Jambi	<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Dokumen	3	275.000.000	<b>Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Prov. Jambi	<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	3	275.000.000	
3	29	05	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratn Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Prosedur Penetapan Prosedur dan Pesyaratn Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	75.000.000	Penetapan Prosedur dan Pesyaratn Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Prosedur Penetapan Prosedur dan Pesyaratn Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	75.000.000	
3	29	05	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah dokumen Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	100.000.000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah dokumen Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	100.000.000	
3	29	05	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	100.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	100.000.000	



3	29	05	1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Dokumen	4	475.000.000	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	4	475.000.000
3	29	05	1.03	01 Penetapan Prosedur dan Pesaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Prov. Jambi	Jumlah Prosedur dan Pesaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang ditetapkan	Dokumen	1	75.000.000	Penetapan Prosedur dan Pesaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Prov. Jambi	Jumlah Prosedur dan Pesaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang ditetapkan	1	75.000.000
3	29	05	1.03	02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Prov. Jambi	Jumlah dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Dokumen	1	100.000.000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Prov. Jambi	Jumlah dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1	100.000.000
3	29	05	1.03	03 Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Laporan	1	200.000.000	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1	200.000.000
3	29	05	1.03	04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Laporan	1	100.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1	100.000.000
3	29	05	1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Prov. Jambi	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	SBM	634	13.789.386.000	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Prov. Jambi	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	634	13.789.386.000
3	29	05	1.04	01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen terkait Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi yang ditetapkan	Dokumen	1	700.000.000	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen terkait Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi yang ditetapkan	1	700.000.000
3	29	05	1.04	02 Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan	Prov. Jambi	Peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan konservasi energi	orang	15	180.000.000	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan	Prov. Jambi	Peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan konservasi energi	15	180.000.000
3	29	05	1.04	03 Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Laporan	2	350.000.000	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	2	350.000.000
3	29	05	1.04	04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi	Dokumen	4	8.559.386.000	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi	4	8.559.386.000
3	29	05	1.04	05 Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi	Prov. Jambi	Jumlah orang yang menerima insentif dan/atau disinsentif konservasi energi	orang	100	3.300.000.000	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi	Prov. Jambi	Jumlah orang yang menerima insentif dan/atau disinsentif konservasi energi	100	3.300.000.000
3	29	05	1.04	06 Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis konservasi Energi	orang	10	100.000.000	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis konservasi Energi	10	100.000.000
3	29	05	1.04	07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Laporan	4	600.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	4	600.000.000

3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Prov. Jambi	Persentase peningkatan rumah tangga berlistrik	Persen	100	5.028.875.000	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Prov. Jambi	Persentase peningkatan rumah tangga berlistrik	100	5.028.875.000	
							Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Persen	27	1.410.469.490			Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	27	1.410.469.490	
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah	Prov. Jambi	Persentase pemegang IUTPLU yang tertib administrasi dan teknis	Persen	100	500.000.000	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah	Prov. Jambi	Persentase pemegang IUTPLU yang tertib administrasi dan teknis	100	500.000.000	
3	29	06	1.01	01	Penetapan Prosedur (Pedoman Teknis) dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUTPL Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam daerah provinsi yang ditetapkan	Dokumen	1	100.000.000	Penetapan Prosedur (Pedoman Teknis) dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUTPL Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam daerah provinsi yang ditetapkan	1	100.000.000	
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi\	Prov. Jambi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan IUTPL Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik	Dokumen	1	200.000.000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan IUTPL Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik	1	200.000.000	
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan	4	200.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	4	200.000.000	
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Persentase pemegang IUTPLS yang tertib administrasi dan teknis	Persen	100	760.469.490	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Persentase pemegang IUTPLS yang tertib administrasi dan teknis	100	760.469.490	
3	29	06	1.02	01	Penetapan Prosedur (Pedoman Teknis) dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Prosedur (Pedoman Teknis) dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	100.000.000	Penetapan Prosedur (Pedoman Teknis) dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Prosedur (Pedoman Teknis) dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1	100.000.000	
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	350.469.490	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1	350.469.490	
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	4	310.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	4	310.000.000	
3	29	06	1.03		Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Persentase pemegang izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (IPJ Telematika) yang tertib administrasi dan teknis	Persen	100	150.000.000	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Persentase pemegang izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (IPJ Telematika) yang tertib administrasi dan teknis	100	150.000.000	
3	29	06	1.03	06	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Laporan	1	150.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi	1	150.000.000	

3	29	06	1.04		<b>Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah</b>	Prov. Jambi	<b>Persentase Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah</b>	Persen	100	420.000.000	<b>Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah</b>	Prov. Jambi	<b>Persentase Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah</b>	100	420.000.000	
3	29	06	1.04	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Dokumen	1	140.000.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	1	140.000.000	
3	29	06	1.04	02	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Pemberian Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Dokumen	1	130.000.000	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Pemberian Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	1	130.000.000	
3	29	06	1.04	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	Laporan	4	150.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	Prov. Jambi	Jumlah Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	4	150.000.000	
3	29	06	1.05		<b>Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri</b>	Prov. Jambi	<b>Persentase pemegang IUJPTL yang tertib administrasi dan teknis</b>	Persen	100	410.000.000	<b>Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri</b>	Prov. Jambi	<b>Persentase pemegang IUJPTL yang tertib administrasi dan teknis</b>	100	410.000.000	
3	29	06	1.05	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	Prov. Jambi	Jumlah kebijakan terkait Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	Dokumen	1	75.000.000	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	Prov. Jambi	Jumlah kebijakan terkait Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	1	75.000.000	
3	29	06	1.05	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	Prov. Jambi	Jumlah Surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	Dokumen	1	185.000.000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	Prov. Jambi	Jumlah Surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	1	185.000.000	
3	29	06	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Laporan	4	150.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	4	150.000.000	

3	29	06	1.06		<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan</b>	Prov. Jambi	<b>Persentase peningkatan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>4.198.875.000</b>	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan</b>	Prov. Jambi	<b>Persentase peningkatan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan</b>	<b>100</b>	<b>4.198.875.000</b>	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat idak Mampu	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat idak Mampu	Dokumen	1	300.000.000	Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat idak Mampu	Prov. Jambi	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat idak Mampu	1	300.000.000	
3	29	06	1.06	02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Prov. Jambi	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Keluarga	200	50.000.000	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Prov. Jambi	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	200	50.000.000	
3	29	06	1.06	03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Laporan	1	200.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1	200.000.000	
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Jambi	Jumlah yang terkumpul terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	1	300.000.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Jambi	Jumlah yang terkumpul terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1	300.000.000	
3	29	06	1.06	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaaan	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaaan	Laporan	3	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaaan	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaaan	3	100.000.000	
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Jambi	Jumlah Sarana Yang Terbangun Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	130	3.098.875.000	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Jambi	Jumlah Sarana Yang Terbangun Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	130	3.098.875.000	
3	29	06	1.06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan	1	150.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Jambi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1	150.000.000	

Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas diharapkan akan tercapai dengan melaksanakan program prioritas di bidang urusan energi dan sumberdaya mineral dengan target kinerja sebagaimana pada Tabel T-C.31.

Untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah sebagaimana disebut di atas, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 juga telah menggariskan program/kegiatan/sub kegiatan pendukung dalam bidang urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019.

Dari hasil review dan klarifikasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan baik prioritas maupun pendukung dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut ditemukan bahwa rumusan program/kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, besaran pagu indikatif, serta prakiraan maju Tahun 2024 telah sesuai dengan kebutuhan.

#### **2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi maupun pengamatan selama pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan musrenbang Provinsi Jambi terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Kegiatan yang diusulkan/diminta oleh masyarakat tersebut terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar yaitu :

**Tabel TC-32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Provinsi Jambi**

**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Energi Terbarukan :  Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi  - Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya (PJUTS)	Provinsi Jambi	Penurunan Penggunaan Energi Tak Terbarukan/Fosil  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil		
2	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan:  Kegiatan penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan  - Pengadaan kWh Meter dan Instalasi Listrik untuk Masyarakat Tidak Mampu - Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)	Provinsi Jambi	Rasio Elektrifikasi  Persentase peningkatan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan		

Usulan kegiatan tersebut di atas dapat terakomodir dalam rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 sebagaimana juga telah digariskan dalam RKPD Provinsi Jambi Tahun 2023 dan besaran/volume akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.



### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

##### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 yang terkait dengan bidang urusan energi dan sumber daya mineral sebagaimana tertuang dalam RKP, sebagai berikut :

**Tabel Identifikasi Kebijakan Nasional (*bidang urusan ESDM*)**

No.	Tema RKP Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	RKP Tahun 2023	
2.	Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	RKP Tahun 2023	

Prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan kebijakan nasional sebagaimana diuraikan pada Tabel diatas berpengaruh cukup besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah Provinsi Jambi, khususnya dalam fokus/prioritas peningkatan kapasitas dan tingkat pelayanan infrastruktur energi, pemantapan infrastruktur sumber daya air, pembangunan sumber daya air, perlindungan sumber air dan ekosistemnya, pemenuhan kebutuhan air serta peningkatan peranan EBT di dalam bauran energi. Hal ini juga berpengaruh sangat besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas dan fungsi dalam bidang urusan energi dan sumber daya mineral.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas ESDM Provinsi Jambi

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas ESDM Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	Terlaksananya pembangunan sumber energi listrik dari sumber-sumber energi baru di daerah belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
		Teralirinya listrik PLN ke desa yang belum berlistrik
2.	Peningkatan Pemanfaatan EBT	Termanfaatkannya Sumber Energi Baru Terbarukan
3.	Mewujudkan konservasi air tanah dan NPA wilayah Sungai Pengabuan Lagan	Terwujudnya zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lagan

## BAB IV

### PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 4.1. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas ESDM Provinsi Jambi berdasarkan kepada pencapaian visi dan misi Guberbur Jambi melalui Dinas ESDM Provinsi Jambi terhadap capaian program yaitu :

- **Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur** yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik. Dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Jambi berperan dalam meningkatkan infrastruktur pelayanan publik berupa peningkatan ketersediaan energi dan akses terhadap jaringan listrik.
- **Meningkatnya Kualitas Lingkungan** yaitu melaksanakan pembangunan yang memanfaatkan ekonomi Sumberdaya alam dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan. Dalam hal ini, peran Dinas ESDM Provinsi Jambi berupa pembangunan sarana dan prasarana energi terbarukan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

#### 4.2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan di Dinas ESDM Provinsi Jambi.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif berjumlah **Rp. 41.119.248.110,-** yang

terdiri dari 4 (empat) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 97 (sembilan puluh tujuh) sub kegiatan.

#### **4.3. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024 dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

**Tabel Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023**  
**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						41,119,248,110			43,495,398,372			
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						19,265,517,620			20,716,605,382			
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						353,000,000			385,000,000			
3	29	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	2 Dokumen	9 Dokumen	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	120,000,000
3	29	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	9 Dokumen	5,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	6,000,000
3	29	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	9 Dokumen	5,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	6,000,000
3	29	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	9 Dokumen	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	6,500,000
3	29	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	9 Dokumen	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	6,500,000
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	2 Laporan	9 Dokumen	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	65,000,000
3	29	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Laporan	9 Dokumen	165,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	175,000,000
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13,475,877,620			14,763,465,382			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	80 Orang	100 persen	12,875,877,620	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	14,163,465,382	
3	29	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	100,000,000	
3	29	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	100,000,000	
3	29	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Laporan	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	100,000,000	
3	29	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	100,000,000	
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Laporan	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	100,000,000	
3	29	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	100,000,000	
3	29	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									920,000,000				970,000,000	
3	29	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tingkat Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	100,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
3	29	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tingkat Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	100,000,000
3	29	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tingkat Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Laporan	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	100,000,000
3	29	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Laporan	100 persen	230,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	250,000,000
3	29	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Laporan	100 persen	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	120,000,000
3	29	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Laporan	100 persen	160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	170,000,000
3	29	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tingkat Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	100 persen	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	130,000,000
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								808,000,000					844,500,000
3	29	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tingkat Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Unit	100 persen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	70,000,000
3	29	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tingkat Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Paket	100 persen	78,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	84,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tingkat Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	50,000,000
3	29	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tingkat Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	50,000,000
3	29	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tingkat Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	50,000,000
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	20 Orang	100 persen	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	140,000,000
3	29	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	40 Orang	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	200,000,000
3	29	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	40 Orang	100 persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	200,000,000
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,225,000,000				1,250,000,000	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tingkat penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Paket	100 persen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	30,000,000
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tingkat penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Paket	100 persen	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	120,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tingkat penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Paket	100 persen	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	40,000,000	
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tingkat penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Paket	100 persen	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	75,000,000	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tingkat penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Paket	100 persen	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	70,000,000	
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tingkat penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	100 persen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	30,000,000	
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Laporan	100 persen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	35,000,000	
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	12 Laporan	100 persen	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	700,000,000	
3	29	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tingkat penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	100 persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	50,000,000	
3	29	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tingkat penyelesaian administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	100,000,000	
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								490,000,000				490,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah barang milik penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	2 Unit	7 unit	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	100,000,000
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah barang milik penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Paket	7 unit	190,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	190,000,000
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah barang milik penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	5 Unit	7 unit	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	200,000,000
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								793,600,000				808,600,000	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Laporan	6 Laporan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	15,000,000
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Laporan	6 Laporan	170,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	180,000,000
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Laporan	6 Laporan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	15,000,000
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	3 Laporan	6 Laporan	598,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	598,600,000
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,200,040,000				1,205,040,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tingkat Penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	8 Unit 2 orang	100 persen	412,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	412,320,000	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tingkat Penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	28 Unit	100 persen	235,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	235,440,000	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tingkat Penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	40 Unit	100 persen	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	70,000,000	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tingkat Penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	4 Unit	100 persen	287,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	287,280,000	
3	29	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Tingkat Penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	2 unit	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	100,000,000	
3	29	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tingkat Penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Unit	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	100,000,000	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								600,000,000				450,000,000	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								300,000,000				200,000,000	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase keterjagaan Kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan  Persentase keterjagaan kualitas dan kuantitas air tanah dari Pengusahaan air tanah baik dan benar, serta berkelanjutan dari aspek konservasi	Jumlah Dokumen Yang Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen 30 Persen	1 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keterjagaan Kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan  Persentase keterjagaan kualitas dan kuantitas air tanah dari Pengusahaan air tanah baik dan benar, serta berkelanjutan dari aspek konservasi	20 Persen 30 Persen	100,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase keterjagaan Kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan Persentase keterjagaan kualitas dan kuantitas air tanah dari Pengusahaan air tanah baik dan benar, serta berkelanjutan dari aspek konservasi	Jumlah zona konservasi air tanah yang ditetapkan dalam daerah provinsi	Jumlah Dokumen Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen 30 Persen	1 Dokumen 2 Dokumen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keterjagaan Kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan Persentase keterjagaan kualitas dan kuantitas air tanah dari Pengusahaan air tanah baik dan benar, serta berkelanjutan dari aspek konservasi	20 Persen 30 Persen	100,000,000		
3	29	02	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi							100,000,000			100,000,000			
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Persentase keterjagaan Kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan	Jumlah dokumen layanan perizinan dan informasi izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah	Tersedianya Pedoman izin dan terkendalinya pelaksanaan pemanfaatan air tanah		20 Persen	1 Dokumen 5 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keterjagaan Kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan	20 Persen	50,000,000		
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Persentase keterjagaan Kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Tersedianya Pedoman izin dan terkendalinya pelaksanaan pemanfaatan air tanah		20 Persen	4 Laporan 5 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keterjagaan Kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan	20 Persen	50,000,000		
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi							200,000,000			150,000,000			
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Persentase keterjagaan Kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan	Jumlah dokumen data dan informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi yang terkumpul	Tersedianya data, Revisi Pergub NPA, pemanfaatan air tanah yang baik, benar dan berkelanjutan		20 Persen	1 Dokumen 5 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keterjagaan Kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan	20 Persen	50,000,000		
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Persentase keterjagaan Kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	Tersedianya data, Revisi Pergub NPA, pemanfaatan air tanah yang baik, benar dan berkelanjutan		20 Persen	4 Laporan 5 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase keterjagaan Kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan	20 Persen	100,000,000		
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN							14,814,386,000			15,627,948,500			
3	29	05	1.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan							275,000,000			285,000,000			
3	29	05	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	Jumlah Dokumen Prosedur (Pedoman Teknis) dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai KeArah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan yang ditetapkan	Dokumen Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan		634 SBM	1 Dokumen 3 Dokumen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	634 SBM	75,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	05	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	Jumlah dokumen Rekomendasi Izin dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai KeArah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Dokumen Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	634 SBM	1 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	634 SBM	110,000,000		
3	29	05	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Dokumen Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	634 SBM	1 Laporan	3 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	634 SBM	100,000,000		
3	29	05	1.02		Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							275,000,000				285,000,000		
3	29	05	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	Jumlah Dokumen Prosedur Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 persen 634 SBM	1 Dokumen	3 Dokumen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	100 persen 634 SBM	75,000,000		
3	29	05	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	Jumlah dokumen Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 persen 634 SBM	1 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	100 persen 634 SBM	110,000,000		
3	29	05	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 persen 634 SBM	1 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	100 persen 634 SBM	100,000,000		
3	29	05	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10,000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun							475,000,000				485,000,000		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	05	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang ditetapkan	Dokumen Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun		100 persen 634 SBM	1 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	100 persen 634 SBM	75,000,000
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	Jumlah dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Dokumen Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun		100 persen 634 SBM	1 Dokumen	4 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	100 persen 634 SBM	110,000,000
3	29	05	1.03	03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Dokumen Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun		100 persen 634 SBM	1 Laporan	4 Dokumen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	100 persen 634 SBM	200,000,000
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Dokumen Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun		100 persen 634 SBM	1 Laporan	4 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	100 persen 634 SBM	100,000,000
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						13,789,386,000					14,572,948,500		
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	Jumlah Dokumen terkait Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi yang ditetapkan	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan		100 persen 634 SBM	1 Dokumen	634 SBM	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	100 persen 634 SBM	700,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	Peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan konservasi energi	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan		100 persen 634 SBM	15 Orang	634 SBM	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	100 persen 634 SBM	180,000,000
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan		100 persen 634 SBM	2 Laporan	634 SBM	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	100 persen 634 SBM	350,000,000
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	Jumlah Dokumen Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan		100 persen 634 SBM	4 Dokumen	634 SBM	8,559,386,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	100 persen 634 SBM	9,342,948,500
3	29	05	1.04	05	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	Jumlah orang yang menerima insentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan		100 persen 634 SBM	100 orang	634 SBM	3,300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	100 persen 634 SBM	3,300,000,000
3	29	05	1.04	06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis konservasi Energi	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan		100 persen 634 SBM	10 orang	634 SBM	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	100 persen 634 SBM	100,000,000
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan		100 persen 634 SBM	4 Laporan	634 SBM	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi  Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (setara barel minyak/SBM)	100 persen 634 SBM	600,000,000
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								6,439,344,490		6,700,844,490			
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi								500,000,000		500,000,000			
3	29	06	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan  2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan.	Persentase pemegang IUTPLU yang tertib administrasi dan teknis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	1 Dokumen	100 Persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan  2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	100,000,000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase pemegang IUTPLU yang tertib administrasi dan teknis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	1 Dokumen	100 Persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	200,000,000
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase pemegang IUTPLU yang tertib administrasi dan teknis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	4 Laporan	100 Persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	200,000,000
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi								760,469,490				770,469,490
3	29	06	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Persentase pemegang IUTPLS yang tertib administrasi dan teknis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	1 Dokumen	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	100,000,000
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase pemegang IUTPLS yang tertib administrasi dan teknis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	1 Dokumen	100 persen	350,469,490	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	350,469,490
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase pemegang IUTPLS yang tertib administrasi dan teknis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	4 Laporan	100 persen	310,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	320,000,000
3	29	06	1.03		Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi								150,000,000				150,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	06	1.03	06	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persentase pemegang izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (IPJ Telematika) yang tertib administrasi dan teknis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	1 Laporan	100 Persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	150,000,000
3	29	06	1.04		Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi								420,000,000				430,000,000	
3	29	06	1.04	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Terkait Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	1 Dokumen	100 Persen	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	145,000,000
3	29	06	1.04	02	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Pemberian Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	1 Dokumen	100 Persen	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	135,000,000
3	29	06	1.04	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	4 Laporan	100 Persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	150,000,000
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri								410,000,000				420,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	06	1.05	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Kebijakan terkait Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase pemegang IUJPTL yang tertib administrasi dan teknis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	1 Dokumen	100 Persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	75,000,000	
3	29	06	1.05	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Persentase pemegang IUJPTL yang tertib administrasi dan teknis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	1 Dokumen	100 Persen	185,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	195,000,000	
3	29	06	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase pemegang IUJPTL yang tertib administrasi dan teknis		99.94 Persen 28.0 Persen	4 Laporan	100 Persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	150,000,000	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan								4,198,875,000				4,430,375,000	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase Peningkatan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	1 Dokumen	100 Persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	225,000,000	
3	29	06	1.06	02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase Peningkatan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	200 Keluarga	100 Persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	50,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
3	29	06	1.05	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Kebijakan terkait Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase pemegang IUJPTL yang tertib administrasi dan teknis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	1 Dokumen	100 Persen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	75,000,000	
3	29	06	1.05	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Persentase pemegang IUJPTL yang tertib administrasi dan teknis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	1 Dokumen	100 Persen	185,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	195,000,000	
3	29	06	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase pemegang IUJPTL yang tertib administrasi dan teknis		99.94 Persen 28.0 Persen	4 Laporan	100 Persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	150,000,000	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan								4,198,875,000				4,430,375,000	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase Peningkatan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	1 Dokumen	100 Persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	225,000,000	
3	29	06	1.06	02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase Peningkatan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	200 Keluarga	100 Persen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	50,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	29	06	1.06	03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase Peningkatan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	1 Laporan	100 Persen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	400,000,000
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Persentase Peningkatan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	1 Dokumen	100 Persen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	300,000,000
3	29	06	1.06	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Persentase Peningkatan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	1 Laporan	100 Persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	100,000,000
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Persentase Peningkatan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	130 Unit	100 Persen	3,098,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	3,205,375,000
3	29	06	1.06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Persentase Peningkatan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.94 Persen 28.0 Persen	1 Laporan	100 Persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. persentase peningkatan rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	99.94 Persen 28.0 Persen	150,000,000
TOTAL													41,119,248,110					43,495,398,372



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Prioritas Palfon Anggaran Sementara Provinsi Jambi Tahun 2023 dalam rangka menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023. Program dan prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.